

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR : 020/K.BAWASLU.KS/01.03/I/2020

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang merupakan alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. bahwa dengan adanya perubahan pejabat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Satuan Tugas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara RB Nomor : 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi bersih dan Melayani dilingkungan Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB pada Tanggal 24 April 2018.
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686400/2019 tanggal 12 Nopember 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KESATU : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;

KEDUA : Tim Pengarah Memiliki Tugas Sebagai Berikut:

1. Merumuskan Konsep Dan Strategi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
2. Melakukan Kerjasama Dengan Kementerian/Lembaga/Instansi Lainnya;
3. Melakukan Koordinasi Dengan Unit Kerja Terkait;
4. Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Tim Pelaksana Memiliki Tugas Sebagai Berikut:

1. Menyusun Rencana Dan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Melaksanakan Konsultasi Dengan Tim Teknis Reformasi Birokrasi Dan Pihak Terkait;
3. Mengusulkan Kepada Pengarah Tentang Program Dan Kegiatan Reformasi Birokrasi;
4. Melakukan Sosialisasi Kepada Seluruh Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi Yang Telah Ditetapkan; Dan
6. Membuat Laporan Hasil Kerja Kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Pengarah Dan Tim Pelaksana Reformasi

Birokrasi Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.

KELIMA : Tim Pengarah Dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Dalam Melaksanakan Tugasnya Tidak Diberikan Honorarium.

KEENAM : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkannya, Dengan Ketentuan Apabila Di Kemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 10 Januari 2020

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



[Handwritten Signature]
ERNA KASYPIAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,
TIM REFORMASI

BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020

NOMOR : 020 /K.BAWASLU.KS/01.03/I/2020
TANGGAL : 10 Januari 2020

No	Nama	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Tim Pengarah		
	1 Erna Kasypiah, S.AG. M.SI.	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal)	Pengarah
	2 Aries Mardiono, S.Sos	Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran	Pengarah
	3 Azhar Ridhanie, S.HI. M.IP	Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran	Pengarah
	4 Ir. Iwan Setiawan, M.P	Koordinator Divisi SDM & Organisasi	Pengarah
	5 Nur Kholis Majid, M.Pd	Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi	Pengarah
II	Tim Pelaksana		
	1 T. Dahsya Kusuma Putra K. M.AP	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan	Penanggung Jawab
	2 Hj. Noorhasanah, SE	Kasubbag. Perencanaan Keuangan dan BMN	Ketua
A	Tim Pelaksana Managemen Perubahan		
	1 Dewi Muliani, S.Si	Kasubbag. Pengawasan Akreditasi Pemantau Pemilu.	Koordinator
	2 Rusihan Anwar, S.Pd	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu	Anggota
B	Tim Pelaksana Penataan Peraturan Perundang-Undangan		
	3 Doddy Yulihartanto, SE, MM	Kasubbag. Sengketa Proses dan Hukum	Koordinator
	4 Rudi Ramadlan, S.Pd	Staf Subbag Hukum, Humas dan Penindakan Pelanggaran	Anggota
Tim Pelaksana Penataan Dan Penguatan Organisasi			

C	5	Herliani, SE	Staf Subbag Administrasi	Koordinator
	6	Novia Puspita Sari, A.Md	Staf Subbag Administrasi	Anggota
D	Tim Pelaksana Penataan Tatalaksana			
	7	Wahyu Nugroho	Bendahara Pengeluaran	Koordinator
	8	Haris Miadi	Staf Subbag Administrasi	Anggota
E	Tim Pelaksana Penataan Sistem Manajemen Sdm Aparatur			
	9	Bagus Bhayu Anggoro, SE	Kasubbag. SDM dan Umum	Koordinator
	10	Mianti, SE	Staf Subbag Administrasi	Anggota
F	Tim Pelaksana Penguatan Pengawasan			
	11	Supriyanto Noor, SE	Kabbag. Pengawasan dan Humas	Koordinator
	12	Supian Hadi, S.AB	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu	Anggota
G	Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
	13	Rachmad Hidayat, SH	Staf Subbag Hukum, Humas dan Penindakan Pelanggaran	Koordinator
	14	M. Rezky Habibi Ramadhani, SH	Staf Subbag Hukum, Humas dan Penindakan Pelanggaran	Anggota
H	Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
	15	Luciana, SE	Staf Subbag Data dan Informasi	Koordinator
	16	Rusmin Afriyadi	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu	Anggota
I	Tim Pelaksana Monitoring Dan Evaluasi			
	17	Jody El Firly, S.IP	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu	Koordinator
	18	Moch. Adi Bagus Tri P	Staf Subbag Hukum, Humas dan Penindakan Pelanggaran	Anggota

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 10 Januari 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



ERNA KASYPIAH